
**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI
KELURAHAN KLAWASIH, DISTRIK SORONG BARAT)**

Oleh :

Yudit Yustince Buratehi,

Ekonomi / Manajemen, Universitas Kristen Papua Sorong

Email : buratehiy@gmail.com

Meyta Longkotoy,

Agnes Eyne Banea

Ekonomi / Universitas Kristen Papua Sorong

Article Info

Article History :

Received 16 Nov - 2022

Accepted 25 Nov - 2022

Available Online

30 Nov – 2022

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of the poor in Klawasih Village, West Sorong District, analyzes the impact of the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of the poor in Klawasih Village, West Sorong District, and knowing the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of the poor in Klawasih Village, West Sorong District. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing, and SWOT analysis. The results showed that 1) The Family Hope Program in Klawasih Village, West Sorong District, started in 2013 until now which aims to reduce poverty has not been implemented effectively. The ineffectiveness of this program is because it is still found to be less targeted and uneven in determining PKH participants, then the ineffectiveness of the timing of disbursement of funds where the time for disbursement of funds is often late and not on time, and the amount of aid funds received by PKH participants does not match the amount required. has been determined by the government which makes this program not in accordance with the objectives, so it has not been able to reduce poverty in Klawasih Village, West Sorong District, 2) The impact felt by PKH recipients is also not optimal, seen from their economic condition which is still lacking , then PKH is considered less effective in improving the welfare of the community in Klawasih Village, West Sorong District, and 3) The Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of the poor in Klawasih Village, West Sorong District has not been effective.

Keyword :

PKH, welfare of the poor

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan di suatu negara atau wilayah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di negara atau wilayah tersebut. Kemiskinan adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang kurang mampu atau memiliki tingkat pendapatan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor yaitu seseorang atau sekelompok orang misalnya hanya berpendidikan rendah, tidak

memiliki modal untuk berusaha, dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi perhatian utama terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Indonesia sebagai negara berkembang juga masih dilanda kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan menimbulkan masalah, misalnya termasuk kriminalitas, putus sekolah dan kesehatan yang buruk.

Tujuan utama program PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung pencapaian kehidupan keluarga kurang mampu dan untuk mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, serta mengubah perilaku yang tidak mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. kesejahteraan keluarga kurang mampu. Dimana secara khusus tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan tingkat pendidikan anak RTSM, dan meningkatkan status kesehatan gizi. Dengan adanya bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat. PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Secara umum, program ini memberikan bantuan keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat RTSM harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Persyaratan yang dimaksud terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.

Dari pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan evaluasi agar program yang dilaksanakan dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan program tersebut. Evaluasi adalah penilaian. Dengan mengevaluasi, program dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Kelemahan akan diantisipasi agar dapat ditingkatkan dan keunggulan dapat lebih ditingkatkan. Sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Klawasi merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak dilaksanakan pada tahun 2010, Kelurahan Klawasi terletak di Kecamatan Sorong Barat. Dimana di desa ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu atau tidak sejahtera karena beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam memanfaatkan kesempatan kerja. Masalah-masalah ini menyebabkan pengangguran dan

kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta sebagian besar masyarakat Klawasi lebih memilih bekerja di usia muda. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), seperti pertama, proses pencairan dana ke RTSM tidak tepat waktu, kedua RTSM yang menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah yaitu untuk pendidikan dan kesehatan..

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, (2020) Implementasi berarti kegiatan mendistribusikan output kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kepada tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan muncul ketika dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan dapat terwujud. Purwanto dan Sulistyastuti (2021)

Van Meter dan Van Horn memandang bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan, (Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E, 2021)

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, mengartikan implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. (Daniel A Mazmanian, 2020)

Unsur-Unsur Implementasi

Unsur-unsur implementasi kebijakan publik menurut Tacjhan dalam Prisca (2020) adalah sebagai berikut : (a) Unsur pelaksana adalah pelaksana kebijakan, yaitu pelaksana kebijakan adalah pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan yang terdiri dari penetapan tujuan dan sasaran organisasi, analisis dan perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, pengerahan manusia,

pelaksanaan operasional, pengawasan, dan penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah birokrasi. Unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan, berbeda dengan tahap perumusan dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi memiliki peran yang besar namun tidak dominan; (b) Program yang dilaksanakan Sebuah kebijakan publik tidak memiliki arti penting tanpa tindakan RL yang diambil dengan program, kegiatan atau proyek. Artinya, program merupakan rencana komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Program menggambarkan tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Program harus memiliki karakteristik berikut: 1) Target yang diinginkan; (2) Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu; (3) Jumlah biaya yang terlibat dan sumbernya; (4) Jenis kegiatan yang dilakukan; (5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasi dan keahlian serta keterampilan yang dibutuhkan.

Pengertian, tujuan dan Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT), terbukti cukup berhasil mengatasi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus terdaftar dan hadir di fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kebidanan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta penimbangan balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan keberadaan anggota keluarga PKH pada satuan pendidikan sesuai jenjang SD, SMA, dan SMP.

Program keluarga Harapan memiliki tujuan, diantaranya adalah: (1) Peningkatan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, (3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4) Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan; (5) Memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan masyarakat miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran akses PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial pada bidang-bidang berikut (petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, 2018): (1) Pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) Daerah terpencil/terbelakang; (3) Perbatasan antar Negara.

Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun kriteria komponen penerima bansos PKH adalah sebagai berikut: (a) Kriteria komponen kesehatan meliputi: (1) Wanita hamil/menyusui; Anak-anak berusia 0 hingga 6 tahun; (2) Kriteria komponen pendidikan; (1) SD/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat; (2) SMP/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat (3) Siswa SMA/Madrasah Aliyah atau sederajat; (4) Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. (b) kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: (1) Lansia mulai dari 60 tahun; (2) Penyandang disabilitas diprioritaskan bagi penyandang disabilitas berat.

Hak dan Kewajiban KPM PKH

Hak KPM PKH, Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan: (1) Menerima bantuan sosial; (2) Bantuan sosial; (3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program bantuan pelengkap di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kewajiban KPM PKH; Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal, diantaranya: (1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan.; (2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah yang wajib belajar 12 tahun. (3) Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari usia 60 tahun atau penyandang disabilitas. (4) KPM menghadiri pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi (a) Pembukaan rekening penerima bansos; (b) Sosialisasi dan edukasi; (c) Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); (d) Proses penyaluran bansos PKH; (e) Penarikan Dana Bantuan Sosial (PKH); (f) Rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH, (g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan kebutuhan dasar, atau sulitnya mengakses pendidikan dan pekerjaan. Ketimpangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan (Yani Afdilla, Isnaini Harapan, Marliyah, 2015)

Menurut Suyanto (2018), kemiskinan adalah tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan pendapatan dan rendahnya kesempatan untuk memperoleh berbagai fasilitas dan fasilitas dalam kesejahteraan sosial akan mempersulit pemenuhan berbagai kebutuhan gizi atau kemampuan untuk tidak sakit, sehingga tidak mengherankan bahwa di lingkungan mereka tingkat kematian sangat tinggi. Suyanto B (2018)

Berdasarkan UU no. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah "keadaan sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak

terpenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

Bentuk-bentuk Kemiskinan

Menurut Thomson, dkk (2015) kemiskinan memiliki bentuk-bentuk kemiskinan, yakni: (a) Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup; (b) Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan standar kesejahteraan, (3) Kemiskinan budaya didefinisikan sebagai suatu bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang pada umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau meningkatkan taraf hidupnya dengan prosedur modern. Kebiasaan seperti ini bisa jadi malas, boros, kurang kreatif dan relatif tergantung pada orang lain. (4) Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang umumnya terjadi dalam tatanan sosial budaya atau sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

Penyebab Kemiskinan

Secara umum, penyebab kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Tingkat pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan situasi ekonomi yang tidak menentu. Jumlah orang yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah tanggungan; (b) Angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara terbagi menjadi dua yaitu pekerja dan non pekerja. Yang tergolong pekerja adalah orang-orang yang berada dalam batas usia kerja. Batas usia kerja bervariasi dari satu negara ke negara lain. Batasan usia kerja yang dianut Indonesia adalah minimal 10 tahun tanpa

batasan usia maksimal; (c) Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja. Untuk pembangunan ekonomi, khususnya industri, jelas dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau setidaknya bisa membaca dan menulis. (d) Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan penduduk miskin dapat menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Ukuran Kemiskinan

Kata “kesejahteraan 2015;” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “makmur” yang berarti aman, damai, dan sejahtera. Sedangkan pengertian “kesejahteraan” itu sendiri adalah suatu hal atau keadaan aman, tentram, damai, aman, menikmati hidup, dan sejahtera.

Sedangkan menurut Midgley (dalam Isbandi, 2015) kesejahteraan adalah suatu kondisi atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai masalah sosial dapat dikelola dengan baik. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia baik material maupun spiritual maka dapat dikatakan sejahtera,

Kesejahteraan

Kata “kesejahteraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “makmur” yang berarti aman, damai, dan sejahtera. Sedangkan pengertian “kesejahteraan” itu sendiri adalah suatu hal atau keadaan aman, tentram, damai, aman, menikmati hidup, dan sejahtera.

Sedangkan menurut Midgley (dalam Isbandi, 2015) kesejahteraan adalah suatu kondisi atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai masalah sosial dapat dikelola dengan baik. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia baik material maupun spiritual maka dapat dikatakan sejahtera. (Adi Isbandi Rukminto, 2015)

Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan menurut BPS adalah sebagai berikut : (a) Penghasilan; (b) Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga; (c) Fasilitas perumahan; (d) Kondisi tempat tinggal; (e) Kesehatan anggota keluarga; (f) Kemudahan mendapatkan pelayanan; (g) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan; (h) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Menurut Koller dalam Bintaro, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu: (1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas perumahan, makanan, dan sebagainya; (2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.; (3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; (4) Dengan melihat kualitas hidup dari sudut pandang spiritual, seperti moral, etika, harmoni, penyesuaian, dan sebagainya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang membimbing peneliti untuk menggali dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik suatu bidang tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Metode Observasi; Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis tentang keadaan yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. (2) Metode Wawancara ; Wawancara adalah suatu proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai.

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah

tertentu dengan teknik bertanya bebas tetapi berdasarkan suatu pedoman yang tujuannya untuk memperoleh informasi spesifik yang mendalam. Hasil wawancara ini akan ditulis dalam bentuk transkrip wawancara yang selanjutnya akan dijadikan bahan atau data untuk dianalisis.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (2013), analisis terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun ketiga baris tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut : (1) Reduksi data (*Data Reduction*), adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Proses reduksi atau transformasi data ini berlanjut setelah penelitian lapangan, hingga penyusunan laporan akhir. Jadi, dalam penelitian kualitatif, reduksi data tidak harus berarti kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, melalui seleksi yang ketat, melalui rangkuman atau uraian singkat, pengklasifikasian dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya. (2) Penyajian Data (*Data Display*), merupakan aliran kedua yang penting dalam kegiatan analitis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari presentasi tersebut; (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion Drawing/verification*), merupakan kegiatan analisis data ketiga dalam penelitian kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tentatif, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini juga dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan kondisi dari dalam (*Strength and Weakness*) maupun dari luar organisasi (*Opportunity and Threat*). Analisis ini dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi.

Berikut adalah penjelasan mengenai analisis SWOT: (1) Kekuatan (*Strength*), merupakan faktor pendukung yang ada pada suatu organisasi; (2) Kelemahan (*Weakness*), merupakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada suatu organisasi; (3) Peluang (*Opportunity*), peluang adalah kesempatan dari luar yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi; (4) Tantangan (*Threat*), tantangan akan selalu ada dan organisasi harus siap menghadapi tantangan ini untuk dapat berkembang lebih maju. Rangkuti Fredy (2016)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi PKH di Kelurahan Klawasih Distrik Sorong Barat

Program Keluarga Harapan di Desa Klawasih Kecamatan Sorong Barat sudah berjalan sejak tahun 2013, fakta yang ditemukan di lapangan pelaksanaan PKH masih belum sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, masih ada peserta PKH yang tergolong keluarga sejahtera namun tercatat sebagai penerima bantuan. Faktanya, banyak penerima manfaat telah terdaftar selama lebih dari lima tahun.

Analisis Dampak PKH di Kelurahan Klawasih Distrik Sorong Barat

Dilihat dari jawaban para informan, sejak adanya Program Keluarga Harapan terbukti penerima PKH semakin sejahtera. Mereka juga berharap PKH terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin terutama untuk membiayai pendidikan dan juga membantu memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya.

Dari beberapa jawaban responden terlihat bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan telah dapat membantu dan berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Dimana para penerima sudah merasa sedikit terbantu dengan bantuan

PKH yang mereka terima selama ini. Dampak yang dirasakan oleh penerimanya antara lain:

- a. Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
- b. Meringankan biaya pendidikan
- c. Membantu kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui

Dengan demikian, program PKH dapat membantu penerima untuk meringankan biaya kehidupan sehari-hari.

Analisis Efektifitas Implementasi PKH di Kelurahan Klawasih Distrik Sorong Barat

a. Indikator Tepat sasaran

Tepat sasaran, yang dilihat dari kesesuaian sasaran program dengan sasaran yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus diarahkan pada sasaran yang konkrit, agar proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Target merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan/program, karena memberikan ukuran berhasil tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Klawasih Kecamatan Sorong Barat terdapat penyimpangan yaitu adanya masyarakat yang dulunya peserta PKH namun sekarang kondisinya sudah membaik secara ekonomi namun masih terdaftar sebagai peserta PKH. Terkait hal tersebut, pendamping PKH atau Dinas Sosial tidak dapat menghapus data sebagai peserta PKH karena data tersebut diperoleh dari BPS yang kemudian diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial, sehingga fasilitator dan Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan mengeluarkan atau mengecualikan peserta PKH.

Kejadian ini juga berlaku sebaliknya, yaitu jika masyarakat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH tetapi tidak menerima bantuan, baik pendamping maupun Dinas Sosial tidak bisa berbuat banyak. Fasilitator hanya bisa memberikan pengertian untuk bersabar agar datanya bisa tercatat di BPS sehingga bisa diolah oleh TNP2K untuk menjadi calon peserta PKH.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat diketahui bahwa ada beberapa penerima manfaat yang dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari namun tetap menerima bantuan. Adapun masyarakat yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan namun tidak terdaftar dalam data penerima PKH ini. Banyak sekali penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan karena data penerima tidak dievaluasi sehingga penerima bantuan PKH selama bertahun-tahun adalah satu keluarga. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan penargetan pada Program Keluarga Harapan di Desa Klawasih Kecamatan Sorong masih terdapat kendala sehingga indikator yang ditargetkan dikatakan belum efektif.

b. Indikator Tepat Waktu

Tepat waktu adalah jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program PKH, proses pencairan dana bantuan harus dicairkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif tidaknya program tersebut. Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan sosial diberikan setiap tiga bulan sekali kepada setiap peserta PKH.

Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat menarik uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Setiap pemangku kepentingan harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga pencairan dana PKH dapat dicairkan tepat waktu. Peran masing-masing pemangku kepentingan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PKH sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara, beberapa responden menjelaskan bahwa waktu pencairan dana bantuan PKH pada tahap awal tertunda karena jumlah pendamping yang sedikit. Namun ke depan relatif stabil namun belum bisa dikatakan tepat waktu karena jadwal pencairan tidak selalu pada tanggal yang sama setiap 3 bulan. Waktu pencairan dana bantuan tidak tepat waktu. Bahkan untuk tahap awal selama satu tahun, bantuan itu tidak dicairkan.

Kemudian dana bantuan dikucurkan sebanyak tiga kali. Hal ini dinilai tidak efektif bagi penerima PKH.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pencairan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan masih belum efektif dan dapat dikatakan belum tepat waktu. Dengan permasalahan seperti ini, banyak masyarakat yang tidak terima dengan adanya keterlambatan pencairan dana bantuan PKH.

c. Indikator Tepat Jumlah

Dalam penyaluran bansos perlu adanya kecocokan besaran bantuan yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya di lapangan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dilihat dari hasil wawancara responden, terlihat bahwa penerima bantuan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah bantuan yang harus mereka terima. Hal ini disebabkan fasilitator kurang detail dalam menjelaskan besaran dana bantuan PKH.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa jumlah bantuan yang diterima pada tahap awal pencairan adalah jumlah yang sama untuk setiap penerima. Hal ini tentu tidak efektif karena setiap kategori penerima manfaat harus menerima jumlah yang berbeda. Jumlah dana bantuan yang diterima tidak dalam jumlah yang tetap, sehingga terkadang masyarakat masih kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) belum sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah dan masih terdapat pemotongan dari pihak lain, seperti dibuktikan dengan perubahan jumlah bantuan di setiap pencairan.

Skenario bantuan yang dilaksanakan selama ini belum mencerminkan adanya keadilan. Sehingga bantuan yang disalurkan seringkali menimbulkan kesenjangan antara peserta PKH dengan komposisi ART dan beban pendidikan yang berbeda. Peserta PKH yang memiliki anak balita lebih dari satu dan memiliki anak yang masih duduk di bangku SD, SMP, SMA masih merasa jumlah bantuan dana PKH belum mencukupi sehingga kurang maksimal atau kurang sehingga tidak bisa membantu. memenuhi kebutuhan hidupnya secara signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Klawasih Kabupaten Sorong belum efektif karena dapat dilihat dari rata-rata jawaban informan untuk semua indikator keberhasilan PKH yang belum terlaksana dengan baik, sehingga Program Keluarga Harapan dapat dikatakan belum berhasil mengatasi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Klawasih, Kecamatan Sorong. Terbukti dari data yang diperoleh bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Klawasih Kecamatan Sorong cenderung meningkat setiap tahunnya

d. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu metode dalam merumuskan strategi perusahaan atau organisasi, SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Pendekatan ini berupaya mengembangkan kekuatan dan kelemahan internal dalam suatu organisasi (*locking in*) dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal (*loking out*).

Pendekatan ini mengusulkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh suatu organisasi dapat diisolasi melalui analisis yang diteliti dari masing-masing elemen ini. Analisis ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi pada saat yang sama meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT	Strengthness: 1. Kesadaran peserta PKH terhadap pendidikan dan kesehatan. 2. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. 3. Usia produktif peserta PKH. 4. Tersedia fasilitas pendidikan dan kesehatan.	Weaknesses: 1. Penerima yang sudah membaik ekonominya tetap menerima bantuan PKH. 2. Masyarakat yang layak menerima bantuan namun tidak terdaftar di data penerima PKH. 3. Penerima bantuan tidak tepat sasaran. 4. Pencairan dana tidak tepat waktu. 5. Pembagian PKH belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Pemerintah
Opportuni ty: 1. Kebij akan	Strategi SO (Strengthness – Opportunity) :	Strategi WO (Weakness – Opportunity):

<p>Pemerintah Nasional. Penda mping sebagai panca indera PKH Dana tidak ditent ukan pengg unaan nya.</p>	<p>1. Melakukan pemberdayaa n peserta PKH 2. Meningkatkan n penggunaan dana bantuan PKH untuk usaha yang lebih kreatif</p>	<p>1. Perbaikan mekanisme pelaksanaan PKH 2. Meningkatkan kualitas SDM peserta PKH</p>
<p>Threat: 1. Jumlah pesert a PKH dan dana sudah ditent ukan 2. Data pendu duk miski n tidak diupd ate</p>	<p>Strategi ST (Strengthness – Threat): 1. Melakukan komitmen yang sudah di sepakati 2. Pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan secara maksimal</p>	<p>Strategi WT (Weakness – Threat): 1. Menggunakan data pembanding sebagai perbandingan data dalam pendataan RTSM. 2. Peserta PKH yang sudah membaik ekonominya digantikan dengan calon peserta PKH yang baru</p>

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 91) Program Keluarga Harapan di Kelurahan Klawasih Kecamatan Sorong Barat yang dimulai sejak tahun 2013 sampai sekarang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan belum terlaksana secara efektif. Ketidakefektifan program ini karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dan tidak merata dalam penentuan peserta PKH, kemudian ketidakefektifan waktu pencairan dana dimana waktu pencairan dana sering terlambat dan tidak tepat waktu, dan jumlah dana bantuan yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. telah ditentukan oleh pemerintah yang menjadikan program ini tidak sesuai dengan tujuan, sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Klawasih Kecamatan Sorong Barat. (2) Dampak yang dirasakan oleh penerima PKH juga belum maksimal, dilihat dari kondisi ekonomi mereka yang masih kurang, PKH dinilai kurang efektif dalam mensejahterakan

masyarakat di Kelurahan Klawasih Kecamatan Sorong Barat.; (3) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Klawasih Kabupaten Sorong Barat belum efektif.

6. REFERENSI

- Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosiali dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bintarto. 2014. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Criswardani Suryati. 2015. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dipnegoro, vol.08, no.03
- Grindle, Merilee S. 2014. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press, New Jersey
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. 2018. *Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan*.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 2012. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company, USA
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2013. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moelong, Lexi J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prisca. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2020. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rangkuti, Freddy. 2016. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Rohiman Notowidagdo. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Amzah
- Suyanto, B. 2018. *Sosiologi Ekonom Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Thomson dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diakses dari <https://books.google.co.id/books>
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 2012. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society
- Yani Afdillah, Isnaini Harahap, Marliyah. 2015. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*. Medan: Febi UIN-SU Press, Cetakan Pertama